LOKAKARYA NASIONAL PARMAS OMBUDSMAN RI BERSAMA JEJARING OMBUDSMAN SE-INDONESIA

Jum'at, 04 Mei 2018 - Sabarudin Hulu

Yogyakarta-Ombudsman Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Lokakarya Nasional Partisipasi Masyarakat pada 2 - 4 Mei 2018 di Grand Mercure Hotel, Yogyakarta.

Atas dukungan The Asia Foundation, Loknas Parmas dibuka oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai didampingi Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu.

Turut hadir 34 Kepala Perwakilan Ombudsman RI se-Indonesia beserta jejaring/sahabat Ombudsman se Nusantara.

"Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada waktu mendatang akan melibatkan komunitas profesional, seperti Dokter, Notaris, dan sebagainya" ujar Prof. Amzulian dalam sambutannya.

Amzulian menjelaskan bahwa tujuan Ombudsman menggandeng komunitas profesional agar masing-masing komunitas dengan berbagai bidangnya dapat mengkaji permasalahan di bidang masing-masing, khususnya terkait pelayanan publik dan komunitas didorong untuk mampu menyampaikan saran/masukan kepada penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana amanat UU Pelayanan Publik, bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dan keterlibatan jejaring/sahabat Ombudsman diharapkan dapat membantu kerja-kerja Ombudsman.

"Tentunya Sahabat Ombudsman tidak bertindak sebagai Ombudsman, namun sebagai pihak-pihak yang membantu memberikan advokasi bagi masyarakat yang mengalami permasalahan pelayanan publik. Jejaring/Sahabat Ombudsman dapat mendampingi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik atau membantu melaporkannya kepada Ombudsman RI maupun kepada Kantor Perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia," tegas Amzulian.

Bellinda, Asisten Ombudsman Jateng bertutur tentang Konco Ombudsman Jateng yang cukup aktif dalam menyuarakan pelayanan publik. "Konco Ombudsman yang kami sertakan salah satunya dari Komunitas Sahabat Difabel Semarang yang sering menyampaikan isu-isu pelayanan publik kepada Ombudsman dan juga aktif mengawasi pelayanan publik khususnya fasilitas publik yang belum ramah terhadap difabel", ujar Bellinda.